

# PERAN ELITE POLITIK LOKAL DALAM UPAYA Mendukung PEMEKARAN KABUPATEN PANTAR PROVINSI NTT

Welhelmina Selfina Beli

## Abstract

*To establish New Autonomous Region, the roles of local political elites are very strong so that expansion policy can be realized. If we look at the dynamics of regional expansion in Indonesia, it has a noble motivation for the welfare of society, but the fact shows that the expansions were only used as the interests of the elites who were thirst for power. Their losses in local elections were used as the weapon to get new positions by struggling for expansion, or also used the issue of expansion as their commodity in regional election and legislative election campaigns.*

*The method used in this study was more qualitative decriptive. The aim of this research was to map the local political elites and to analyze the roles of the local political elites in an effort to support the expansion of Pantar regency East Nusa Tenggara. Analysis conducted relying on primary data obtained through secondary document review and in-depth interview with competent sources.*

*Keywords: Decentralization, Roles of Local Political Elites, Regional Expansion*

## I. Pendahuluan

Tercapainya negara yang sejahtera menjadi tujuan mulia yang hendak dicapai oleh negara-negara dunia. Dengan tujuan inilah berbagai teori dan pemikiran dari para ahli tentang bagaimana konsep yang tepat dalam membangun negara mencapai kesejahteraan dirancang. Salah satu kebijakan yang menjadi pilihan adalah kebijakan desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi dapat dipandang secara politik dan administratif. Menurut Parson dan Smit (Lili Romli 2007: 8) adalah sebagai berikut: dalam perspektif administrasi, menurut Parson adalah *the sharing of power between member of the same ruling group having authority respectively in defferent areas of the state*. Tidak ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasan. Perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efesiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama dalam desentralisasi. Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah *the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierrarchy could be one of goverment within a state, or offices within a large organization*.

Jika melihat tujuan desentralisasi maka dampaknya juga bisa terlihat dari stabilisasi politik. Sharpe (1981) berargumentasi bahwa stabilisasi politik nasional mestinya berawal dari stabilisasi politik pada tingkat lokal. Kenyataannya di Indonesia kebijakan pemekaran hampir selalu diikuti dengan konflik.

Selama ini sejak berlakunya UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi [UU No 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintah Daerah, terlihat bahwa semangat melakukan pemekaran wilayah terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika melihat kembali peristiwa konflik

pembentukan Provinsi Tapanuli dari Sumatera Utara (Provinsi induk) yang sampai sekarang masih diperjuangkan ternyata menjadi peristiwa paling tragis. Pemekaran hanya dipicu oleh perbedaan keyakinan walaupun dilihat dari faktor lain bahwa ada juga ketimpangan pembangunan. Mayoritas penduduk yang ada di daerah Tapanuli bagian utara, dan barat sangat didominasi oleh penduduk Kristen dan Khatolik, sementara Tapanuli bagian tengah relatif berimbang antara penduduk Kristen dan Islam, hanya Tapanuli bagian selatan yang didominasi oleh pemeluk Islam. Karena perbedaan keyakinan inilah berdampak juga pada tataran birokrasi, yang mana akses pelayanan dan jabatan birokrasi hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dari keyakinan mayoritas. Itulah sebabnya Tapanuli Selatan tidak mau bergabung dalam rencana wilayah Provinsi Tapanuli ini, meskipun sama-sama Tapanuli. Hal ini dikarenakan dominasi pemeluk Islam di daerah Tapanuli Selatan yang lagi-lagi beranggapan jika bergabung dengan Provinsi Tapanuli yang mayoritas Kristen & Khatolik malah jadi daerah yang dimarginalkan nantinya.

Permainan para elite politik dengan berbagai muatan kepentingan menjadikan proses pemekaran Provinsi Tapanuli hanya menjadi tujuan politik semata dan betapa ironi melihat dinamika politik lokal dengan kepentingan para penguasa (elite) dengan berbagai cara agar tujuan mereka dapat tercapai, tanpa disadari bahwa selama ini pemekaran wilayah boleh dikatakan tidak pernah menjadi solusi yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Tidak ketinggalan dengan daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak tahun 1999 sampai 2012 berdasarkan data Kemendagri sudah ada 9 kabupaten baru yang dimekarkan antara lain:

1. [Kabupaten Lembata](#), pemekaran dari [Kabupaten Flores Timur](#) (4 Oktober 1999)
2. [Kabupaten Rote Ndao](#), pemekaran dari [Kabupaten Kupang](#) (10 April 2002)
3. [Kabupaten Manggarai Barat](#), pemekaran dari [Kabupaten Manggarai](#) (25 Februari 2003)
4. [Kabupaten Nagekeo](#), pemekaran dari [Kabupaten Ngada](#) (2 Januari 2007)
5. [Kabupaten Sumba Tengah](#), pemekaran dari [Kabupaten Sumba Barat](#) (2 Januari 2007)
6. [Kabupaten Sumba Barat Daya](#), pemekaran dari [Kabupaten Sumba Barat](#) (2 Januari 2007)
7. [Kabupaten Manggarai Timur](#), pemekaran dari [Kabupaten Manggarai](#) (17 Juli 2007)
8. [Kabupaten Sabu Raijua](#), pemekaran dari [Kabupaten Kupang](#) (29 Oktober 2008)
9. [Kabupaten Malaka](#), pemekaran dari [Kabupaten Belu](#) (14 Desember 2012)

Dari beberapa daerah yang dimekarkan di Nusa Tenggara Timur, menarik untuk melihat hasil penelitian dari Jacqueline Vel (dalam Henk Schulte Nordholt dan Gery Van Klinke 2014: 129-138) untuk [Kabupaten Sumba Tengah](#), yang merupakan pemekaran dari [Kabupaten Sumba Barat](#) pada 2 Januari 2007. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya para penguasa lokal dan

kekuatan-kekuatan sosial dibalik pemekaran. Penguasa lokal adalah para bangsawan di Sumba (keturunan Raja atau sebagai bangsawan bertanah), karena di Sumba tanah menjadi sumber kekuasaan yang sangat penting. Berdasarkan analisis yang lebih cermat kita dapat melihat elite lokal mana yang aktif dalam kampanye di Sumba sebenarnya adalah sebuah kelompok kecil. Para peserta yang lebih tua adalah anggota-anggota marjinal dari elite lokal dengan status yang secara tradisional dianggap memadai untuk diterima sebagai pemimpin tetapi dalam posisinya pada pemerintahan atau sektor swasta tidak memuaskan mereka atau yang posisinya menempatkan mereka di luar pembuatan keputusan.

Orang-orang terkemuka ini terdiri dari kepala desa, seorang pendeta yang diskors dari jabatan Gerejanya akibat sejarah panjang konflik-konflik besar maupun kecil dan beberapa pensiunan pegawai negeri sipil. Mereka didukung oleh sekelompok besar anak muda berpendidikan tinggi yang menganggur yang tidak ingin bekerja di pertanian dan mereka memandang kabupaten baru sebagai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Besarnya pengeluaran dalam biaya kampanye di Sumba mencapai 900 juta rupiah untuk Sumba Tengah, namun fakta menunjuka bahwa Sumba Tengah masih jauh dari harapan tercapainya pelayanan publik yang baik sesuai dengan tujuan pemekaran.

Kabupaten Alor adalah salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur yang berdiri sejak tahun 1958 dengan wilayah administrasi meliputi: 17 Kecamatan, 17 Kelurahan, 158 Desa. Dari 17 kecamatan ini, 5 diantaranya (Kecamatan Pantar, Pantar barat, Pantar timur, Pantar tengah, Pantar barat laut) akan menjadi satu kabupaten baru, dengan nama Kabupaten Pantar, jika memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Untuk membentuk Daerah Otonomi Baru, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.

Sekitar tahun 1970-an usulan untuk pembentukan kabupaten Pantar sudah ada namun tidak ada realisasinya, artinya sejak 1958 setelah itu kurang lebih 13 tahun sesudah Kabupaten Alor berdiri gaung pemekaran sudah dibunyikan. Namun isu pemekaran seolah-olah hilang dibawa arus dinamika politik dan perubahannya. Isu pemekaran Kabupaten Pantar muncul lagi di tahun 2002, 2004 dan 2008. Di tahun 2002 isu ini muncul, namun karena saat itu syarat pemekaran harus dikuti dengan jumlah kecamatan minimal harus 3 kecamatan, sedangkan kecamatan yang ada di Pantar hanya 2 kecamatan yaitu, Kecamatan Pantar dan Kecamatan Pantar Barat, akhirnya yang diperjuangkan adalah pembentukan kecamatan baru. Isu tahun 2004 dan 2008 isu ini muncul dengan kepentingan politik (menjelang proses pemilihan kepala daerah).

Siapa saja elite politik lokal yang berperan aktif dalam proses pemekaran, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan sampai ke Pusat? Jika dilihat dari hasil studi kelayakan terhadap pemekaran Kabupaten Pantar, di dapati bahwa studi kelayakan dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kekurangan terutama untuk jumlah penduduk, kemampuan ekonomi dan lain-lain. Karena itu dalam pembahas tentang rencana pembentukan Kabupaten Pantar yang dibahas dalam Rapat DPRD Kabupen Alor pada bulan januari 2013, dari hasil rapat tersebut belum mencapai titik temu

karena masih terdapat pro-kontra dari para anggota legislatif. Tolak menolak dalam proses pengesahan kebijakan pemekaran ini terjadi karena para wakil rakyat sendiri menyadari bahwa Kabupaten Pantar belum bisa dikatakan layak untuk dimekarkan.

Peran para elite lokal baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengawal proses pemekaran dari setiap tahap sampai ke Jakarta akan sangat berarti. Dari proses ini dapat dilihat siapa saja elite yang terlibat aktif dalam proses pemekaran, sebab keterlibatan mereka nantinya akan berhubungan juga dengan apa yang akan mereka dapatkan nantinya, seperti pendapat Harold D. Laswell dalam bukunya, *Politics: Who Get's What, When, How* (1938) dalam Miriam Budiardjo (2008: 73) menjelaskan bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan untuk mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Apa yang akan di dapat oleh para elite dan massa bila proses pemekaran ini membuahkan hasil? karena dalam proses ini sudah banyak hal yang dipertahankan dalam mendukung proses pemekaran. Apakah kepentingan elite akan diikuti dengan tujuan mulia pemekaran demi kesejahteraan masyarakat atautkah kesejahteraan elite?

Timer Jaap (2007: 596) mengungkapkan pemekaran sebagai proses "pemecahan kekuasaan" akhirnya mengarah pada konstetasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Elite politik lokal seperti haus akan kekuasaan, sebab mereka yang kalah dalam Pilkada kadang menjadikan isu pemekaran sebagai sarana empuk dalam memobilisasi keinginan mereka untuk mengapai kekuasaan yang baru. Begitu juga dengan pemekaran Kabupaten Pantar yang didominasi oleh kepentingan elite dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal. Para elite berlomba untuk menjadikan pemekaran sebagai "komoditas" dalam memobilisasi massa baik untuk kepentingan Pemilihan Kepala daerah, kepentingan Pemilihan Legislatif dan lain sebagainya.

Penelitian difokuskan untuk memetakan elite politik lokal yang mempengaruhi proses pemekaran Kabupaten Pantar dan menganalisis peran elite politik lokal dalam upaya mewujudkan pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. Metoda Penelitian

Dalam penelitian *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mewujudkan Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi Nusa Tenggara Timur*, desain penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Menurut Nawawi (2005: 31), metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya penemuan fakta.

Untuk teknik penentuan informan dengan cara *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* adalah teknik mencari sumber data dari informan dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya peneliti akan memilih informan yang dianggap paling tahu sesuai dengan situasi dan topik peneliti. Teknik *snowball* adalah teknik mencari sumber data dari informan yang pada awalnya

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, karena dari jumlah yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan.

Sumber data yaitu (1) data primer, data ini berasal dari hasil wawancara elite politik lokal pemerintah dan non-pemerintah yang ambil bagian dalam proses pemekaran Kabupaten Pantar, (2) data sekunder, data yang akan peneliti dapat dari proposal usulan pembentukan DOB Pantar, laporan studi kelayakan Kabupaten Pantar oleh Tim Universitas Nusa Cendana, Surat Keputusan Bupati, DPRD (Kabupaten dan Provinsi) dan Gubernur untuk pemekaran Kabupaten Pantar, artikel/jurnal, majalah, dokumen, koran, situs internet dan bahan-bahan dari yang berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah Kabupaten Pantar.

Teknik pengumpulan data (1) wawancara, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dari informan dan karena peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan informan kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih terarah, (2) dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, gambar hidup dan lain-lain. Sugiyono (2012: 240). Dokumen yang akan dikumpulkan adalah dari proposal usulan pembentukan DOB Pantar, laporan studi kelayakan Kabupaten Pantar oleh Tim Universitas Nusa Cendana, Surat Keputusan Bupati, DPRD (Kabupaten dan Provinsi) dan Gubernur untuk pemekaran Kabupaten Pantar serta hasil berita di media cetak dan elektronik tentang proses pemekaran Kabupaten Pantar.

Teknik Analisis, (1) Reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya. (2) Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. (3) Penarikan Simpulan/verifikasi, simpulan masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### **III. Hasil Penelitian**

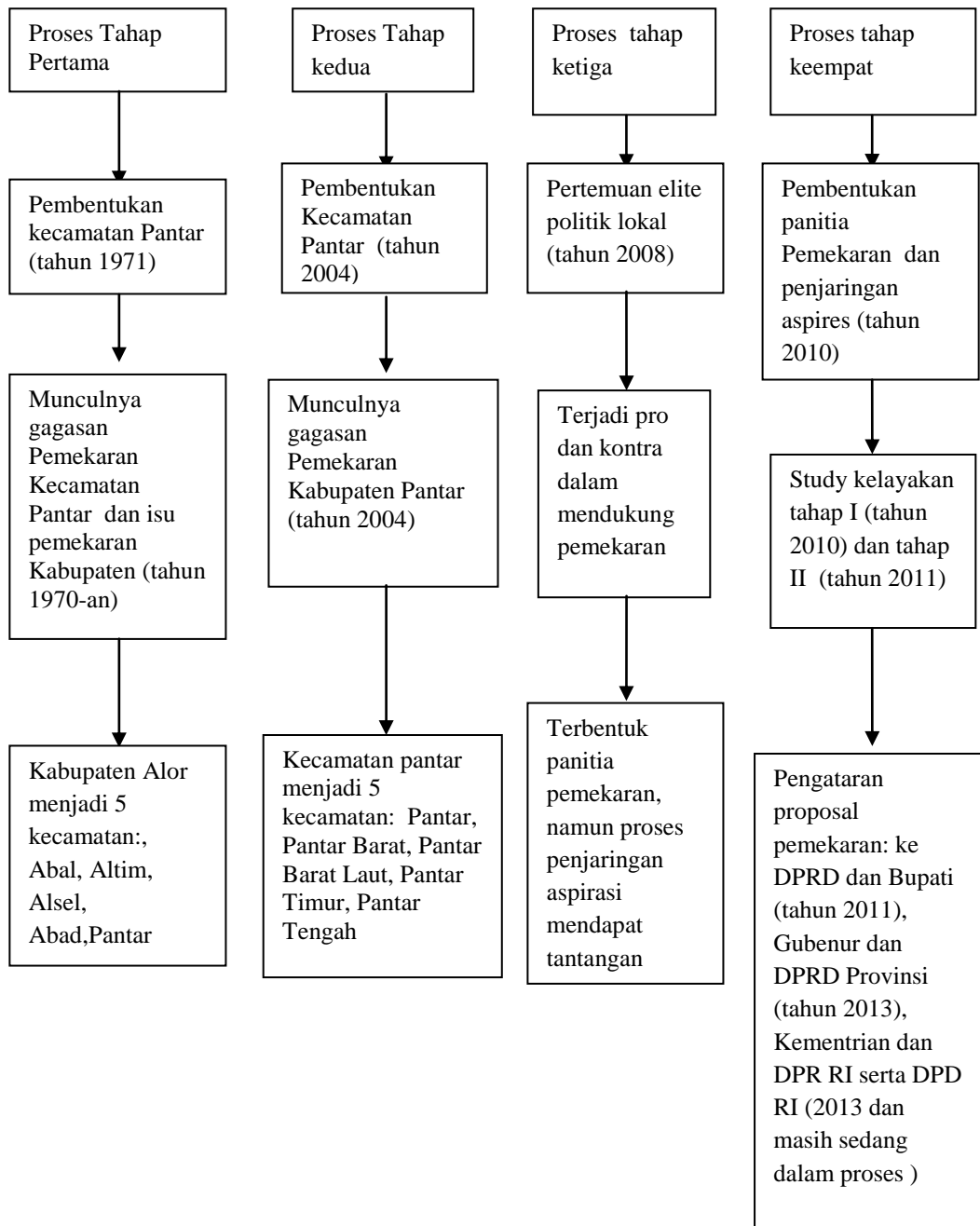
Kabupaten Pantar adalah salah satu Calon Daerah Otonomi baru (DOB) yang akan menjadi DOB di wilayah Provinsi NTT. Pada saat ini pemekaran Kabupaten Pantar sudah sampai pada tingkat pusat dan tinggal menunggu keputusan dari DPR RI. Seperti diketahui bahwa dari 87 DOB Kabupaten Pantar tidak termasuk di dalamnya, baik dari 65 DOB yang akan dibahas RUU nya maupun 22 DOB tambahan. Dari 65 DOB yang masuk dari NTT hanya Kabupaten Adonara pemekaran dari Kabupaten Flores Timur dan Kota Maumere pemekaran dari Kabupaten Sikka.

Bagaimana strategi yang dibangun agar pemekarn tidak hanya menjadi isu semata namun menjadi kenyataan takkala dengan prosedur legal maupun ilegal suatu kebijakan dapat terealisasikan. Perjuangan panjang elite politik lokal baik

yang ada di kabupaten, provinsi bahkan sampai ke pusat menggambarkan bahwa pemekaran menjadi perjuangan panjang dan melelahkan.

Berikut dapat dilihat kronologis pemekaran Kabupaten Pantar yang di bagi dalam 4 tahap yaitu mulai dari isu pemekaran sampai pada kebijakan pemekaran:

Gambar 1.1  
Kronologis Pemekaran Kabupaten Pantar



Kebijakan pemekaran kecamatan sampai pada kebijakan rencana pemekaran Kabupaten Pantar selalu di dominasi oleh elite pemerintah. Dalam tabel dibawah ini akan menjelaskan secara singkat tujuan keterlibatan elite dalam proses pembentukan kecamatan dari tahap pertama dan tahap ke dua, serta diikuti dengan rencana pembentukan kabupaten dari tahap isu di tahap ketiga sampai pada tahap kebijakan pemekaran Pantar ditahap keempat:

Tabel 1.1  
Peran dan Identifikasi Tujuan Elite Kunci yang Mencetuskan Gagasan Pemekaran Kecamatan dan Kabupaten Pantar

Tahap Pembentukan Kecamatan						
No	Elite	Jabatan	Peran	Tujuan yang ingin dicapai	Waktu pelaksanaan	Realisasi
1.	Yulius Nangolan dan Yunus Bire	Anggota DPRD Kupang	menghadap Gubernur meminta agar Kecamatan Pantar juga bisa menjadi satu kecamatan sendiri	Pantar bisa lebih menjadi lebih sejahtera	Tahun 1970-an	Terbentuk kecamatan Pantar di tahun 1971
2.	Drs. Jack Djobo	Bupati Alor tahun 1978-1984	Menyampaikan gagasan kepada masyarakat untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pantar	Berkaitan dengan kepentingan politik	Tahun 1978	Hanya wacana
3.	Ir. Ans Takalape-ta	Bupati Alor tahun 1999-2009	Membentuk 3 kecamatan baru di pantar	Bisa maju lagi dalam Pilkada 2004-2009, dengan mengakomodir kepentingan masyarakat agar dapat menjadi Kabupaten baru	2002	Tahun 2004, Pantar dimekarkan menjadi 5 kecamatan

Tahap Isu Pembentukan Kabupaten						
1.	Drs. Amon Djobo	Asisten 3 Kabupaten Alor	Menyampaikan gagasan isu pemekaran Kabupaten Pantar dalam visi dan misi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Alor	Bisa menang dalam Pilkada 2004-2009	2004	Hanya wacana karena Drs. Amon Djobo akhirnya mengundurkan diri dalam pencalonan Pilkada
2.	Welem Blegur	Anggota DPRD Kabupaten Alor	Menyampaikan gagasan isu pemekaran Kabupaten Pantar kepada beberapa anggota dewan	Mendukung Drs. Amon Djobo dalam Pilkada	2004	Tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan di DPRD Kabupaten Alor
3.	Marten Maure, SH	Anggota DPRD Kabupaten Alor	Antara lain: 1.megundang seluruh <i>stakeholder</i> agar dapat membahas rencana pemekaan 2.membentuk panitia pemekaran 3.melakukan sosialisasi ke masyarakat	Berkaitan dengan Pilkada (2009-2014)dengan mengusung salah satu kandidat tertentu. Serta berkaitan juga dengan kepentingan politik secara pribadi yaitu beliau juga maju dalam Pilkada 2014-2019, namun akhirnya kalah dalam putaran pertama	2008	Terbentuk panitia pemekaran namun mendapat banyak penolakan dari Masyarakat Pantar dan elite Pemerintah, akhirnya tidak terealisasi



4.	Drs. Simeon Pally	Wakil Bupati Alor periode 1999-2004	Menghambat perjuangan Marten Maure dalam proses pembentukan kabupaten, sebab beliau juga menjadikan pemekaran sebagai isu dalam kampanye Pilkada	Bisa menang dalam Pilkada 2009-2014	2008	Berhasil menjadikan pemekaran Pantar sebagai isu dalam kemenangan Pilkada 2009-2014, namun pemekaran masih dalam tahap isu
Kebijakan Pembentukan Kabupaten Pantar						
1.	Drs. Simeon Pally	Bupati Alor periode 2009-2014	Antara lain: 1.membentuk panitia penjaring aspirasi 2.Memperjuangkan proses pemekaran sampai ke pusat	Bisa menang lagi dalam pilkada 2014-2019	2010	Kabupaten Pantar tidak masuk dalam daftar daerah yang akan dimekarkan, berkaitan juga dengan pergantian anggota DPR RI
2..	Drs. Amon Djobo	Bupati Alor periode 2014-2019	Memperjuangkan pemekaran Pantar ke DPR RI dan DPD RI	Bisa menang lagi dalam pilkada 2019-2024	2014	Setelah melakukan konsultasi dan pertemuan dengan elite di pusat, kabupaten pantar akan diperjuangkan namun belum ada realisasinya

Selain elite kunci seperti dalam tabel di atas ada juga Elite-elite yang Terlibat Dalam Proses Pembuatan Keputusan Pemekaran. Elite lokal yang terlibat dapat dilihat dari elite di Kabupaten Alor dan Elite di Kupang antara lain:

Tabel 1.2

Tabel Elite-elite yang Terlibat Dalam Proses Pembuatan Keputusan Pemekaran

Elite Pemerintah di Kabupaten Alor			
No.	Nama	Jabatan	Keterlibatan dalam pemekaran
1.	Drs. Simeon Pally	Bupati Alor Periode 2009-2014	Tokoh kunci dalam mengurus proses di kecamatan sampai pusat
2.	Melkson Beri, SH, M.Hum	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Menjadi Wakil ketua dalam panitia pemekaran di Alor, menangani administrasi dalam pemekaran dan ikut terlibat dalam pengantaran proposal sampai di pusat
3.	Markus Malaka, SH	Ketua DPRD Kabupaten Alor	Menjadi elite kunci di DPRD Kabupaten Alor dalam pengambilan keputusan pemekaran
4.	Marten Maure	Anggota DPDR Kabupaten Alor Komisi A	Terlibat dalam Membidangi hukum dan pemerintahan di komisi A serta ikut ambil bagian dalam pengantaran proposal sampai ke pusat
Elite non-Pemerintah di Kabupaten Alor			
	Nama	Jabatan	Keterlibatan dalam proses pemekaran
5.	Marianus Kaat, S.Pd, MM	Pengusaha	Menjadi ketua panitia pemekaran yang terlibat dari proses pembentukan panitia dari tingkat kecamatan dan aktif dalam pengantaran proposal sampai ke pusat
6.	Moris Weni, S.Sos	Wartawan	Menjadi sekretaris panitia pemekaran yang terlibat dari proses pembentukan panitia dari tingkat kecamatan dan aktif dalam pengantaran proposal sampai ke pusat

7.	Rasid Lewa	Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat yang aktif dalam pertemuan di Kalabahi dan pengantaran proposal sampai ke pusat
8.	Singga Muda Ilu		
9.	Dominggus Blegur		
10.	Sem Serang		
11.	Welem Blegur		
<b>Elite Pemerintah di Kupang</b>			
1.	Frans Lebu Raya, S.P.d	Gubernur NTT Periode 2009-2019	Sebagai pemberi persetujuan dalam proses pengurusan DOB pantar ke tingkat pusat
2.	Gabriel Beri Bina, SH, M, Hum	Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi A	Menjadi anggota komisi A yang aktif dalam memprovokasi anggota DPDR Provinsi dalam mendukung persetujuan pemekaran Pantar
3.	Selvester Banfatin, M. Si	Kepala Biro Pemerintahan NTT	menangani administrasi dalam pemekaran dan ikut terlibat dalam pengantaran proposal sampai di pusat
4.	Drs. I. Meda	Ketua DPRD Provinsi NTT	Menjadi elite kunci di DPRD Provinsi dalam pengambilan keputusan pemekaran
<b>Elite non-Pemerintah di Kabupaten Alor</b>			
1.	Dr. Aleks Ena	Dosen Universitas Kristen Arta wacana Kupang	Menjadi panitia kunci dalam pengurusan proses pemekaran di Kupang
2.	Dr. Zet Sonny Libing	Kepala Bidang Diklat Provinsi NTT	
3.	Jhon Pering, SE, M.Si	Dosen Universitas PGRI Kupang	
4.	Ir. Ans Takalapeta	Mantan Bupati Alor	Menjadi tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam pertemuan di Kupang sampai pada proses pengantaran proposal di ke DPDR Provinsi dan Gubernur
5.	Aba Malaka, S.Sos	MantanWalik Bupati Alor	
6.	Dr. Ima Blegur	Mantan anggota DPR RI	
7.	Fredik Dolu	Dosen Universitas PGRI Kupang	
8.	Jack Karmani	Tokoh masyarakat	
9.	Welmince	Tokoh masyarakat	

#### IV. Pembahasan

##### 1. Elite yang Mengalami Pergantian

Konsep pergantian elite menurut Pareto akan terlihat dari:

- a. Pergantian diantara kelompok-kelompok elite yang memerintah itu sendiri

b. Diantara elite dan penduduknya

Runtuhnya elite menurut Pareto diakibatkan karena terjadi perubahan dalam sifat psikologi berbagai kelompok elite yang berbeda, karena itu elite harus memerintah dengan melakukan penyerapan untuk mengelabui masa dan memeralatnya. Serta Mosca melihat pergantian elite berkaitan dengan bagaimana kecakapan elite dalam menjalankan kontrol politik.

Dalam rencana proses pemekaran Kabupaten Pantar, terjadi pergantian elite seperti konsep Pareto dan Mosca. Pergantian elite dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tabel Pergantian Elite

1. Diantara Kelompok yang Memerintah

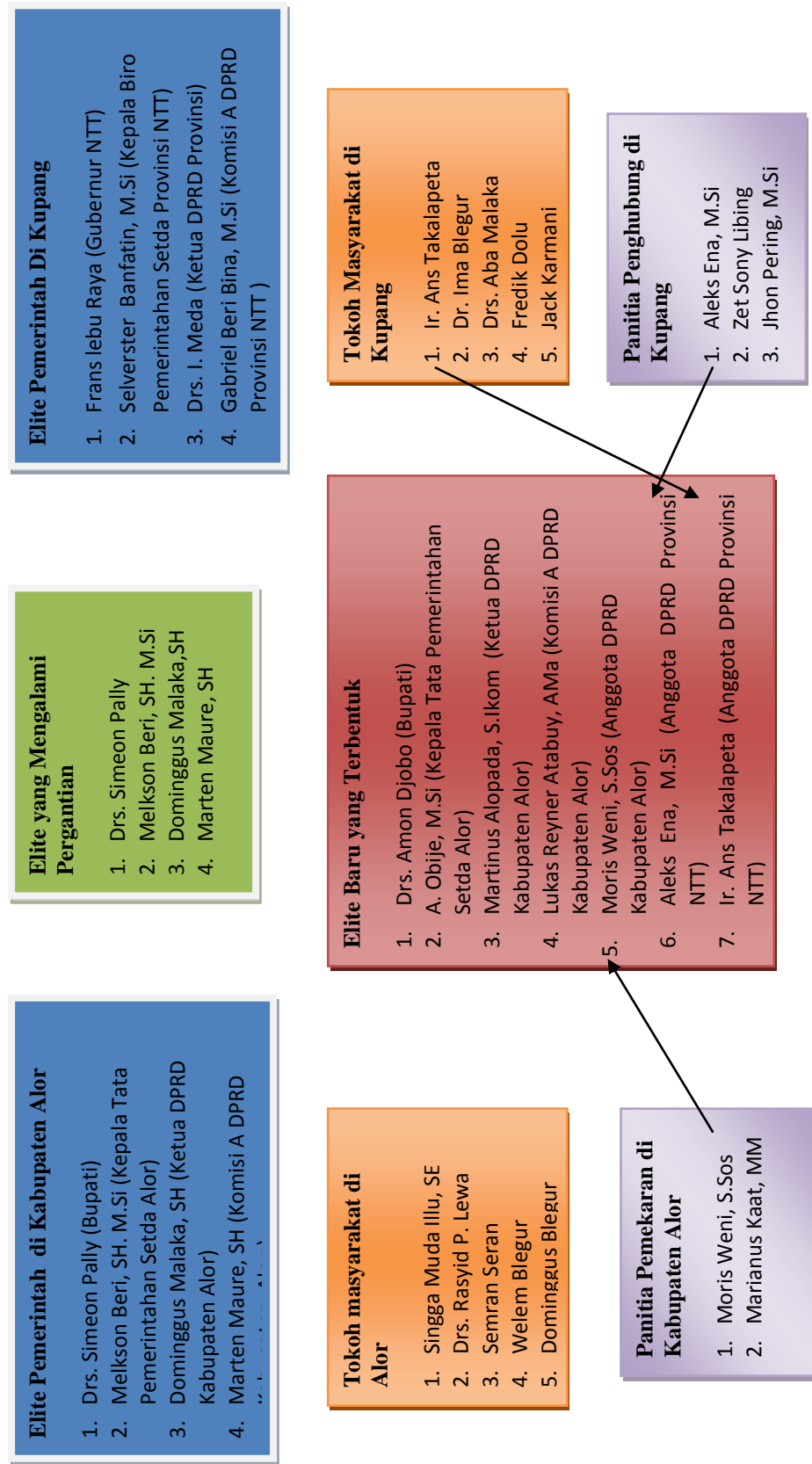
No.	Nama	Pergantian Jabatan	Kontrol Politik	Elite baru
1.	Drs. Simeon pally	Bupati Alor	Memetakan para kroni dalam proses pemekaran, namun selisih suara dengan Drs. Amon Djobo membuatnya harus menuai kekalahan dalam putaran ke 2 Pilkada kabupaten Alor	Drs. Amon Djobo
No.	Nama	Pergantian Jabatan	Kontrol Politik	Elite baru
2.	Melkson Beri, M.Si	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Alor	Menjadi kepala bagian selama 6 bulan dalam proses pemekaran dan sebagai wakil ketua dalam panitia pemekaran, namun setelah pergantian Bupati beliau pun dimutasi	Ati Obije, M.Si
3.	Dominggus Malaka, SH	Ketua DPRD Kabupaten Alor	Menjadi salah satu pendukung dalam proses pemberian keputusan untuk persetujuan	Asyer Alopada, S.Ikom

			pemekaran, namun kalah dalam pileg walaupun daerah pemilihannya bukan termasuk wilayah kecamatan Pantar	
4.	Marten Maure	Anggota DPRD Kabupaten Alor Komisi A	Menjadi inisiator pada rencana pemekaran Pantar 2008, namun tidak terealisasi, kemudian mengundurkan diri dari anggota DPRD dan mencalonkan diri dalam Pilkada Alor dan akhirnya kalah pada putaran pertama	Lukas Reyner Atabuy, AMa

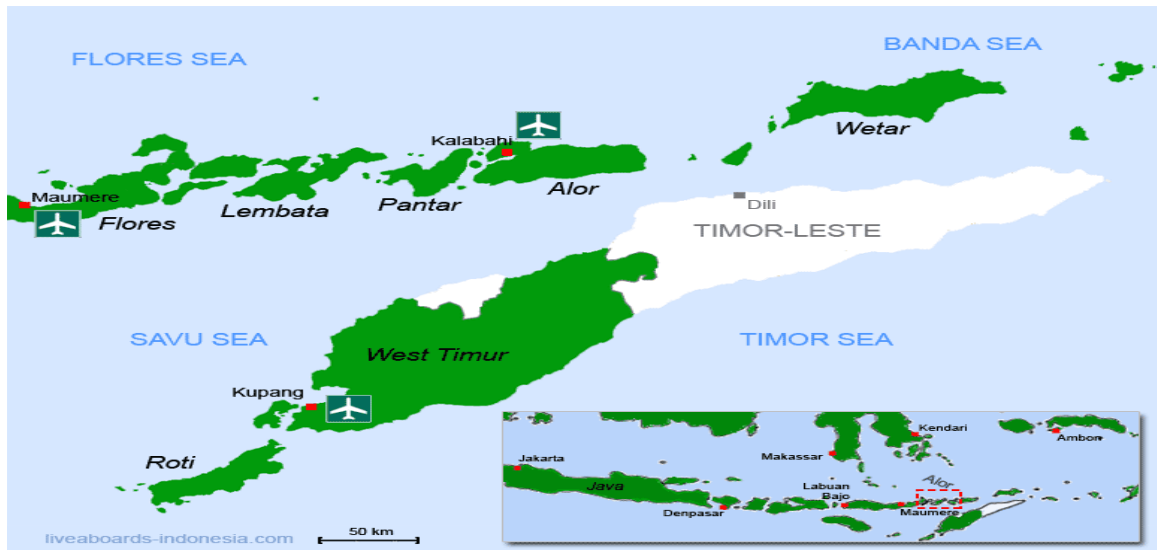
## 2. Diantara Elite Dan Penduduknya

No.	Pemasukan Elite	Jabatan baru	Kontrol politik
1.	Moris Weni, S.Sos	Dari Wartawan Menjadi Anggota DPRD periode 2014-2019	Menjadi panitia pemekaran yang sangat berperan aktif dalam penjangkaran aspirasi serta menjadikan pemekaran sebagai isu dalam kampanye, sehingga daerah pemilihan di Pantar menjadi sasaran empuk dalam kemenangannya
2.	Aleks Ena, M.Si	Dari Akademis menjadi Anggota DPRD Provinsi	Menjadi panitia penghubung di Kupang dalam mengurus proses pemekaran yang dianggap cukup berhasil karena sangat cepat prosesnya dan berkaitan juga dengan kampanye caleg DPRD Provinsi
3.	Ir. Ans Takalapeta	Dari mantan Bupati Alor menjadi anggota DPRD Provinsi NTT	Menjadi tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pemekaran di Kupang dan berkaitan dengan proses kampanye caleg DPRD Provinsi

Gambar 1.2  
 Gambar Pemetaan Elite yang Terlibat Dalam Proses Pemekaran



Gambar 1.3  
Gambar Pemetaan Elite Dalam Peta NTT



- Elite Pemerintah di Kabupaten Alor**
1. Drs. Simeon Pally (Bupati)
  2. Melkson Beri, SH. M.Si (Kepala Tata Pemerintahan Setda Alor)
  3. Dominggus Malaka, SH (Ketua DPRD Kabupaten Alor)
  4. Marten Maure, SH (Komisi A DPRD Kabupaten Alor)

- Elite Pemerintah Di Kupang**
1. Frans lebu Raya (Gubernur NTT)
  2. Selvester Banfatin, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT)
  3. Drs. I. Meda (Ketua DPRD Provinsi)
  4. Gabriel Beri Bina, M.Si (Komisi A DPRD Provinsi)

- Tokoh masyarakat di Alor**
1. Singga Muda Illu, SE
  2. Drs. Rasyid P. Lewa
  3. Semran Seran
  4. Welem Blegur
  5. Dominggus Blegur

- Tokoh Masyarakat di Kupang**
1. Ir. Ans Takalapeta
  2. Dr. Ima Blegur
  3. Drs. Aba Malaka
  4. Fredik Dolu
  5. Jack Karmani
  6. Melmimo

- Panitia Pemekaran di Kabupaten Alor**
1. Moris Weni, S.Sos
  2. Marianus Kaat, MM

- Panitia Penghubung di Kupang**
1. Aleks Ena, M.Si
  2. Zet Sony Libing

## 2. Peran Elite Politik Lokal di Kabupaten Alor

Keterlibatan elite dapat diamati dari proses tata cara pembentukan daerah berdasarkan PP 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah, antara lain:

Tata cara pembentukan daerah terdiri dari prosedur mekanisme dari tingkat desa sampai pada tingkat provinsi, untuk pemekaran satu kabupaten menjadi 2 kabupaten, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.5

Mekanisme atau Tahapan Pembentukan Daerah

No.	Tahapan	Elite yang terlibat	Identifikasi kepentingan elite
1.	Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten yang akan dimekarkan.	Panitia kunci yaitu: Marianus Kaat, MM dan Moris Weni, S.Sos	Marianus Kaat sebagai pengusaha yang akan berkepentingan dalam proyek daerah pemekaran. Moris Weni sebagai wartawan di salah satu surat kabar di Alor serta sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Alor tahun 2014-2019
2.	DPRD kabupaten dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;	Ketua DPDR Kabupaten Alor, Markus Malaka, SH, wakil ketua DPRD, Deny Lalitan dan anggota: 1.Komisi A (Sulaiman Singsh dan Yonatan Mokay) 2.Komisi B (Hermanto Djaha Mouw) 3. Komisi C (S. Badu dan Soleman Gorangmau)	Ketuan dan wakil DPRD tidak punya kepentingan sebab daerah pemilihannya tidak ada pada wilayah kecamatan Pantar. Ketua DPRD berasal dari partai Golkar yang sebagian anggotanya mendukung ada juga yang menolak. Wakil ketua berasal dari partai Demokrat satu partai dengan Bupati Simeon Pali namun tidak banyak ambil pusing karena tidak punya kepentingan, walaupun belian adalah salah satu pengusaha sukses di Kabupaten Alor. Untuk beberapa anggota komisi yang terlibat ada kepentingan untuk maju lagi dalam pileg dan sebagai partai pendukung dalam Pilkada selanjutnya



3.	Bupati memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati berdasarkan hasil kajian daerah dan Bupati mengusulkan pembentukan kabupaten kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:	Bupati Drs. Simeon Paly, periode 2009-2014 dan Bupati Drs. Amon Djobo, periode 2014-2019	<p>Pembentukan panitia diawali dari ide Bupati Drs. Simeon Paly sebagai realisasi dari janji kampanye, serta sebagai tujuan untuk bisa menang dalam pilkada selanjutnya. Bupati juga membentuk panitia penghubung di Kupang dan menempatkan kroni-kroninya dalam panitia pemekaran, jajaran birokrasi dan tim studi kelayakan.</p> <p>Terjadi pergantian elite Bupati Drs. Amon Djobo menggantikan Bupati Drs. Simeon Paly, dan untuk tetap menjaga kepentingan politik beliau menggantikan beberapa jabatan politik yang ada yaitu asisten 1 sampai 3 dan kepala tata pemerintahan, menggantikan kroni-kroni Bupati Simeon Paly dan memperjuangkan pemekaran dengan alasan politik agar dapat terpilih lagi dalam pilkada 2019-2024</p>
4.	Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah	Gubernur Frans Lebu Raya	Menjadi Gubernur selama 2 periode 2009-2019. Sempat menjual isu pemekaran sebagai isu dalam kampanye Pilgub untuk rencana pemekaran DOB Adonara dan Maumere namun belum terealisasi. Karena itu gubernur juga mendukung pemekaran
5.	DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten	Ketua DPRD Provinsi, A. Meda dan Komisi A, Gabriel Beri Bina	Kepentingan untuk menang dalam pemilihan legislatif. A Meda akhirnya menjadi anggota DPD RI dan Gabriel Beri Bina menjadi caleg yang menang lagi sebagai anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019

Tujuan yang ingin dicapai dari pemekaran Kabupaten Pantar hanyalah kepentingan Politik dengan permainan elite politik lokal. Jika sampai ke pusat pun perjuangan menjadi sia-sia sebab pengusulan ke pusat boleh dikatakan sudah terlambat, tanggal 6 Januari proposal pemekaran di antar ke Provinsi setelah itu pada Februari dan April di bawa ke Jakarta. Sedangkan jika dibandingkan dengan DOB yang masuk ke kemendagri untuk DOB Pantar dianggap terlambat, selain itu juga berkaitan dengan pergantian DPR RI sehingga prosesnya menjadi kompleks.

Dari segi politik, proses pemekaran semakin diperlambat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Apakah anggota DPDR tidak punya kepentingan di Pantar? dari jumlah suara di Pantar bisa mencapai 23.838 (Daftar Pemilih Tetap) sangat berpotensi untuk menang di Pulau Pantar.

Jumlah penduduk dari hasil studi kelayakan sangat tidak bisa dipercaya oleh sebab itu wajar jika anggota DPRD merasa masih ragu, namun masalah ini akhirnya tidak begitu lagi dipermasalahkan dalam sedang Paripurna. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk di Kabupaten Pantar dari tahun 2009-2012.

Tabel 5.7  
Jumlah Penduduk Pulau Pantar

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Tahun 2009	Tahun 2012	Tahun 2013
Pantar	8.198	8.973	9.084
Pantar Barat	6.055	6.862	6.948
Pantar Timur	11.474	10.953	11.089
Pantar Barat Laut	4.302	4.361	4.415
Pantar Tengah	9.500	9.497	9.615

Sumber:diolah dari data BPS Kabupaten Alor

Jika melihat data di atas dari jumlah penduduk terjadi penambahan penduduk di setiap kecamatan. Saat Panitia Pemekaran Kabupaten Pantar mengantarkan proposal pemekaran ke DPRD dan Bupati, data yang digunakan dari hasil proposal pemekaran adalah data Badan Pusat Statistik tahun 2009, dengan menggunakan perhitungan di tahun 2008. Untuk hasil studi kelayak data yang digunakan adalah data statistik tahun 2009. Mungkin alasan ini bisa masuk akal, jika banyak yang merasa bahwa Pantar belum saatnya diperjuangkan menjadi Calon DOB.

Mendasarkan pada data BPS NTT yang tersedia bahwa pada tahun 2012 jumlah kecamatan di NTT sebanyak 290 buah dengan jumlah penduduk NTT sebanyak 4.776.485 jiwa, maka diperoleh rata-rata jumlah penduduk kecamatan di NTT kurang lebih sebanyak 16.471 jiwa per kecamatan. Selanjutnya dengan jumlah penduduk calon kabupaten Pantar sebanyak 43.437 jiwa, maka besarnya skor jumlah penduduk calon kabupaten Pantar sebesar 2,64 atau setara skor 3.

Setelah tahap kedua Tim studi kelayakan melakukan pendataan ulang dengan tidak menggunakan data BPS tahun 2009. Akhirnya melalui studi

khusus dengan persetujuan Bupati tentang Swakelola Paket Pekerjaan Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik Daerah Kabupaten Alor, yang juga disahkan oleh Sekda (Drs. Okto Lasiko), diperiksa oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Hopni Bukang, SH), dikonsultasikan dengan Kabag Hukum dan Ham (Mekson Beri, SH, M,Si) dan disiapkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Alor (Drs. Martin Hitikama), proyek pendataan pun dilakukan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dibutuhkan dana sebesar Rp. 392.684.000.- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2012 pada Pos Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.

Jumlah penduduk di Pulau Pantar tidak mengalami perubahan seperti yang ada dalam data di atas pada tahun 2012. Penambahan penduduk dengan data statistik masih tetap menunjukkan rendahnya jumlah penduduk, namun data ini dihitung dengan cara yang salah sebab indikator dari BPS dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sangat berbeda. Secara illegal data yang digunakan adalah dari data Kantor catatan sipil yang menghitung jumlah penduduk dari kartu keluarga bisa saja orang tersebut hanya dicantumkan ke kartu keluarga tetapi tidak berdomisili di Pantar. Begitu juga dengan cara perhitungan yang menghitung semua penduduk dari Pantar yang tersebar di Kecamatan lain menjadi penduduk Pantar, karena berasal dari suku yang sama.

Anehnya DPRD tetap memberikan persetujuan juga. Setelah mendapatkan persetujuan di DPRD, sekarang kerjanya Pemerintah (Bupati dan SKPD/ Tata Pemerintahan), Bagian Tata Pemerintahan dengan tugas dan fungsi dalam menyiapkan kelengkapan administrasi agar dapat melengkapi data untuk mendukung kesiapan dan kelancaran dalam proses pemekaran Kabupaten Pantar.

Peran bupati dapat dilihat dari bagaimana Bupati Amon Djobo mengintervensi para anggota DPRD untuk bisa memperlambat usaha mendukung pemekaran Kabupaten Pantar. Jelas bahwa tidak ada alasan pemahaman yang ada hanya alasan “kepentingan”.

Vilfredo Pareto menjelaskan bahwa orang yang dalam kodratnya bukan hanya berbeda secara fisik saja namun secara intelektual, dalam lingkungan aktifitas politik, ekonomi dll, selalu dijumpai orang yang memiliki kepandaian dan kemampuan istimewa, mereka bukan hanya memiliki motivasi tinggi dalam usaha mengejar dan mencapai kebutuhan hidup, melainkan pandai membaca situasi serta sangat cermat pengantisipasi keadaan. Inilah tindakan yang diambil oleh Amon Djobo dengan mengintervensi beberapa anggota depan yang mendukungnya sebagai calon Bupati Alor 2014-2019 agar dapat memperlambat pemberian persetujuan dalam pemekaran kabupaten Pantar.

Bupati Amon Djobo mempertaruhkan kedudukannya sebagai bupati, dalam perjuangan pemekaran, dengan beberapa pernyataan di media massa (lihat tabel 5.6 ) yang banyak mengandung unsur politik.

Tabel 1.6  
Komentar Bupati di Media Masa Selama Tahun 2014

Waktu	Komentar
-------	----------

<p>Selasa, 1 April 2014</p>	<p>Orang Pantar jangan cemas karena tidak mendukung saya, karena isu yang berkembang bahwa, dalam urusan Pilkada kemaren, sebagian besar rakyat di pulau itu memberikan suara bagi pasangan Drs. Simeon Th. Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA. Hanya 4 ribu lebih suara yang disumbangkan dari Pulau Pantar untuk kemenangan Djobo-Duru. Karena itu wajar jika Orang Pantar ada dalam suasana cemas begitu KPU tetapkan Djobo-Duru sebagai pemenang Pilkada Alor. Tetapi rasa cemas itu sudah ditepis Bupati Alor, Drs. Amon Djobo. Djobo menegaskan komitmen untuk mengantarkan Pulau Pantar menjadi Daerah Otonom Baru hanya dalam limit waktu 2-3 tahun. Kalau saya menjadi Bupati Alor untuk kurun waktu 5 tahun, maka dalam waktu 2-3 tahun saya akan jadikan Pulau Pantar menjadi kabupaten sendiri.</p>
<p>Jumat, 18 April 2014</p>	<p>“Waktu dua bulan lalu kita adakan syukuran di Bakalang, saya sudah bilang, selama 5 tahun saya pimpin Alor, dalam 2 atau 3 tahun Pantar tidak jadi kabupaten sendiri maka kalau saya maju lagi orang Pantar jangan pilih Amon Djobo. Itulah komitmen saya kepada bapa, mama, kakak-adik di Pantar,” ungkap Djobo.</p>
<p>Jumat, 23 Mei 2014</p>	<p>Pembentukan Kabupaten Pantar ini sebenarnya sudah saya gagas pada lima belas tahun yang lalu, cuma tidak ada yang melanjutkannya. Pembentukan Kabupaten Pantar menjadi tugas pertama saya. Harus tuntas dijamin kepemimpinan saya. Saya juga secara diam-diam telah membangun komunikasi dengan relasi saya yang ada di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri agar proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pantar ini dapat dipercepat. Upaya pihaknya membangun komunikasi dengan DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri RI ini dimaksudkan agar begitu kran pembentukan DOB dibuka, Pantar kita harapkan jadi prioritas</p>

Sumber: Surat Kabar Ombay News

Artinya keberanian Bupati dalam mempertaruhkan pemekaran menjadi taruhan politik. Jika Pantar sampai tidak menjadi DOB maka, Bupati Amon Djobo jangan dipilih lagi. Alahasil seandainya sampai tahun 2014 Pantar bisa jadi DOB, secara politik peluang besar beliau untuk maju lagi menjadi Bupati Periode 2019-2024 terbuka lebar. Namun pasti ada juga ketakutan secara politik, orang-orang kuat dari Bupati yang lama yaitu Bupati Simeon Pally tetap harus disingkirkan agar terlihat bahwa perjuangan pemekaran adalah berasal dari orang-orang yang loyal kepada Bupati Amon Djobo.

Tentunya ada tawar menawar politik dengan pihak ketiga, namun sejauh ini tawar menawar dari pihak-pihak tersebut belum direspon secara serius

karena masih ada tawar-menawar yang belum bisa disepakati dengan Pemerintah daerah.

Terhitung sudah 3 kali Bupati Amon Djobo ke Jakarta. Pertemuan tersebut untuk bisa mendapat kesempatan memrepresentasikan proposal pemekaran pada dan melakukan lobi politik dengan DPR RI. Pada tanggal 21 September 2014 silam sudah ada pertemuan dengan DPR RI dan masih menunggu lagi bagaimana kabar selanjutnya dari pusat. Informasi terakhir ada lagi pertemuan dengan DPR RI pada 26 November 2014.

Jika dilihat dari perubahan elite di DPR RI dan DPD akan sangat berpengaruh dalam proses pemekaran, selain itu dengan adanya perubahan UU Pemerintah daerah, nantinya jika Pantar akan menjadi Kabupaten baru pun maka harus menunggu lagi menjadi daerah persiapan. Namun tidak ada yang pasti dalam politik.

Pergantian elite tidak hanya dengan pergantian bupati namun diikuti juga dengan pergantian Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada masa kepemimpinan Bupati Pally yang membentuk panitia dan memetakan kroninya, kini berganti dengan wajah baru yaitu terjadi pergantian pada Kepala Tata Pemerintahan, Sekretasi Daerah, Asisten 1,2 dan 3. Untuk tokoh masyarakat Bupati juga hanya memilih orang-orang dekatnya.

## **V. Penutup**

### **Simpulan**

1. Gagasan pemekaran Kabupaten Pantar muncul dari para elite politik lokal di Kabupaten Alor. Elite ini terdiri dari mantan asisten 3 Kabupaten Alor yang akhirnya menjadi Bupati Alor pada periode 2014-2019, Bupati Alor periode 2004-2009, yang sebelumnya adalah wakil bupati Alor antarwaktu dari tahun 2001-2004, yang kemudian harus kalah dalam pertarungan Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Alor periode 2014-2019 dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Alor.
2. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh para elite kemudian berusaha membangun kekuatan untuk mencapai tujuan mereka, namun ada elite yang akhirnya harus kalah dalam pertarungan kekuasaan di Kabupaten Alor. Para elite ini adalah Bupati, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Anggota DPRD Kabupaten Alor
3. Para elite politik lokal berusaha untuk menjadikan pemekaran sebagai sarana agar bisa dijadikan modal dalam memperoleh kekuasaan. Isu pemekaran Kabupaten Pantar telah menjadi barang jualan oleh elite politik lokal di Kabupaten Alor. Para elite menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk bisa memperjuangkan pemekaran daerah kabupaten Pantar sebagai sebuah perjuangan aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah.
4. Elite politik lokal sebagai ujung tombak kesejahteraan masyarakat di daerah tidak melihat apa kebijakan yang tepat demi kesejahteraan masyarakat. Pergantian elite mengakibatkan mutasi dan promosi dalam jajaran pemerintahan daerah. Para elite baru yang berkuasa menjalankan kebijakan daerah dengan semauanya dengan terus menjadikan pemekaran sebagai kekuatan dalam mendapatkan kedudukan politik. Seperti pernyataan Bupati

Amon Djoboi bahwa “jika Pantar tidak menjadi DOB jangan pilih saya dalam Pemilihan Kepala daerah 2014-2019” terlihat ada unsur politik dalam perjuangan pemekaran.

## Saran

1. Kebijakan pemekaran yang telah dibuka oleh Pemerintah tidak serta merta membuat elite politik lokal berlomba-lomba memekarkan daerahnya tanpa tujuan dan arah yang jelas. Isu pemekaran dibaluti dengan aspirasi masyarakat yang kuat sehingga pemekaran menjadi harga mati untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah makna yang sangat “dangkal”. Pemerintah daerah harusnya lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
2. Pemerintah Pusat harus lebih mempertegas kebijakan pemekaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) harus tegas menyatakan jika DOB belum layak dimekarkan, sehingga dengan sikap tegas ini DOB yang memang belum layak tidak akan menjadi DOB baru, maka elite politik lokal tidak bisa berbuat banyak jika hasil pertimbangan memang benar.

## Daftar Rujukan

### Buku:

- Abdul, Rosak. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama
- Brodjonegoro, Bambang (ed). (2009). *Sewindu Otonomi Daerah perspektif Ekonomi*. Jakarta: Komite Pemantauna Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal, Era Otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Islam, Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi aksara
- Ita, Hans. (2008). *50 Tahun Kabupaten Alor Dalam Bingkai Sejarah dan Pembangunan*. Jakarta: Hanfed Institute
- Keller Suzanne. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elite*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong J.Lexy. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T.Remaja Rosdakarya.
- Marijan, Kacung. 2012. *Sistem Politik Indonesia (cet.3)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho, Riant. (2000). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian Dan Kritis Atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Nurhasim (ed). (2005). *Konflik Antar Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Handari. (2005). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (cet.11). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Okamoto, Abdul Rozaki (ed). (2006). *Kelompok Kekerasa dan Bos Lokal di Era Reformasi*. Yogyakarta: IRE PREES
- Robert van Niel. (1984). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Romli, Lili. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rasyid, Ryaas. (2005). *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press

Ratnawati, Tri. (2009). *Pemekaran Daerah, Politik Lokal, dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
Syaukani, H. Gaffar Afan dan Rasyid Ryaas. (2009) (cet VI). *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
S.P. Varma. (1987). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &*. Bandung: ALFABETA  
Sarundajang S H.( 2005). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka  
Sumartono Karim. (1991) *Kelompok Elite dalam Implementasi Pembangunan*, CV.Rajawali Press Jakarta.  
Warsito, Yuwono Teguh. Edi Santoso (ed). (2010 )*Otonomi Daerah Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lolak*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi daerah dan Kebijakan Publik (GloGAPPS Undip)  
Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS  
Yuwono, Teguh. Warsito. Purwoko (ed). (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: membangun daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi daerah dan Kebijakan Publik (GloGAPPS Undip)

#### **Tesis**

- Wahyuni, Desi Rina Sry. (2010). *Dinamika Politik Lokal Dalam Proses Konsolidasi Pemekaran Daerah Kabupaten Cilaca*. Tesis. Semarang: UNDIP
- Leydin, Hubertus. (2011). *Analisis Stakeholder Dalam Proses Formulasi Kebijakan Pemekaran Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Yogyakarta: UGM

#### **Aturan Hukum**

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah  
PP 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penggabungan daerah

#### **Sumber Media Massa:**

Kompas, (Kamis, 15 Juli 2010)  
Kompas, (Rabu, 4 Februari 2009)  
Ombay News, (22, Februari 2014)  
Ombay News, (28 Januari 2013)  
Ombay News, (1 April 2014)  
Ombay News, (18 April 2014)  
Ombay News, (23 Mei 2014)

#### **Sumber Internet**

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff.( 2010). *Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010  
[http://www.aipipolitik.org/.../3\\_Politik%20Lokal%20di%20Indonesia\\_Leo%20A...](http://www.aipipolitik.org/.../3_Politik%20Lokal%20di%20Indonesia_Leo%20A...) di unduh pada Kamis 3 Juli 2014, pukul 12.00 WIB

I Ngurah Suryawan. Komin Tipu Komin: Elite Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153) <http://www.jurnalsopol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20>  
oleh IN Suryawan – di unduh pada Kamis 3 Juli 2014, pukul 12.00 WIB

Haryanto. (2009). *Elite Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2, November 2009 (131-148) <http://www:journalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20>

Di unduh pada kamis 3 juli 2014, pukul 12.00 wib

[www.kemendagri.ac.id](http://www.kemendagri.ac.id). di unduh pada 20 juni 2014, Pukul 10.30 WIB

<http://www.alorkab.go.id/webalor2012/index.php/profildaerah/geografis.html>.

Diunduh pada 15 Oktober 2014 pukul 19.10 WIB

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/30/ncpn9ckemendagri-usulan-87-daerah-otonom-gunakan-uu-pemda-baru>. Diunduh pada 1 November 2014 pukul 21.00 WIB)